

## **BAB III**

### **PERKEBUNAN TEH GUNUNG MAS MASA PT**

#### **PERKEBUNAN TAHUN 1971 - 1996**

##### **A. Dari Perusahaan Negara Menjadi Perseroan Terbatas**

Di bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pada masa Pemerintahan Belanda, tanaman teh telah menjadi salah satu komoditi ekspor untuk meningkatkan ekonomi negara. Namun, eksistensi dari tanaman teh sebagai tanaman ekspor ini mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Jepang yang berkelanjutan hingga masa kemerdekaan Indonesia. Kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan masa pemerintahan Belanda. Dapat dikatakan bahwa selama periode 1942 – 1969 merupakan masa kemunduran peranan tanaman teh bagi ekonomi Indonesia. Kesulitan yang dihadapi pada periode tersebut adalah:

1. Belum adanya stabilitas politis. Situasi politik yang berkembang pada waktu itu masih sangat dipengaruhi oleh Perang Dunia II dan peristiwa pasca Perang Dunia II lainnya, sehingga menjadi penyebab penurunan luas areal dan produktivitas kebun teh.
2. Kurangnya pengembangan sumber daya alam
3. Masih banyak terjadinya perbaikan dan pembenahan pada perkebunan teh<sup>1</sup>
4. Nasionalisasi telah mengakibatkan kemunduran ekspor karena kelangkaan tenaga kerja yang terlatih untuk menggantikan tenaga kerja asing.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ita Setiawati, *Teh: Kajian Sosial – Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 84.

Seperti yang sudah disebutkan adanya berbagai kesulitan yang dihadapi tanaman teh untuk kembali menjadi pengekspor, salah satunya adalah pada poin kedua, ketiga dan keempat yang menunjukkan nasionalisasi belum menghasilkan peningkatan yang cukup untuk mengembangkan perkebunan nasional. Faktor penghambat terpenting dari berbagai penghambat tersebut adalah kurangnya tenaga terlatih dan terampil dalam bidang perkebunan.

Di perkebunan – perkebunan nasional, tenaga – tenaga kerja di bagian administrasi biasanya diisi oleh tenaga kerja asing yang pada umumnya lebih terampil dibandingkan dengan tenaga kerja pribumi. Dengan nasionalisasi yang mengalihkan perkebunan asing ke perkebunan negara membuat tenaga kerja asing tersebut digantikan oleh tenaga kerja pribumi yang belum memahami pengelolaan perkebunan. Kurangnya pelatihan dan pengalaman bagi tenaga kerja pribumi untuk bekerja di bagian administrasi perkebunan, tenaga kerja pribumi biasanya hanya bekerja di lapangan saja seperti menjadi pemetik teh, mandor, ataupun buruh pabrik. Hal ini juga yang berdampak pada kurangnya pengembangan sumber daya alam dan perbaikan dalam pengelolaan perkebunan nasional karena hal tersebut sangat bergantung dari pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memiliki keterampilan dalam mengelola perkebunan.

Sebab utama munculnya berbagai hambatan setelah nasionalisasi adalah kurangnya modal pemerintah untuk melakukan pemeliharaan lahan perkebunan, pengelolaan manajemen perkebunan dan pelatihan bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintah adalah kelembagaan perusahaan

---

<sup>2</sup> Anne Booth, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 15.

perkebunan milik negara dirubah melalui pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 9/1969 dan PP. No. 12/1969. Proses pengalihan dari PN menjadi PT dilakukan secara bertahap dan melalui penilaian akan kelayakannya. Dalam rangka pengalihan tersebut terdapat 28 buah PNP yang diusahakan untuk dijadikan PT. Sampai tahun 1972, jumlah PNP yang telah disetujui oleh pemerintah dijadikan PT sebanyak 13 buah yang kemudian menjadi PT XI, PT XII, PT XIII, PT XXIII, dan XXVI.

Meskipun adanya pergantian – pergantian perusahaan, tetapi secara pengelolaannya hampir sama dengan yang sebelum – sebelumnya. Seperti pada tahun 1971, meskipun Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) digantikan oleh PT Perkebunan (PTP) tetapi secara administrasi pengelolaan PTP mirip dengan PNP hanya perbedaan bahwa PNP masih dalam berbentuk Perusahaan Negara (PN) sedangkan PTP adalah naungan sebuah Perseroan Terbatas (PT)<sup>3</sup>, tetapi keduanya sama – sama sebagai BUMN.

Meskipun secara administrasi dan pengelolaan antara PNP dengan PTP tidak mengalami pergantian yang jauh berbeda, tetapi pembentukan PTP ini memiliki maksud tersendiri dibandingkan perubahan dari PPN ke PNP. PPN maupun PNP yang masih dalam berbentuk Perusahaan Negara (PN) sehingga orientasi pembentukannya adalah masih mengutamakan peningkatan mutu dari perkebunan di Indonesia. Tetapi, PTP yang sudah beralih ke Perseroan Terbatas (PT) ini dimaksudkan karena orientasi dari perkebunan di Indonesia ini bukan lagi

---

<sup>3</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1991), hlm. 178.

untuk peningkatan mutu saja tetapi mendorong kembali tanaman teh ini sebagai komoditi ekspor. Dengan kembalinya teh Indonesia diekspor ke berbagai negara, maka akan meningkatkan kembali ekonomi negara.

Oleh sebab itu, pembentukan dari PTP ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk kembali membuat tanaman teh menjadi komoditi yang penting untuk memberikan devisa kepada negara. Beberapa alasan yang menyebabkan terbentuknya PTP adalah:

a. Menarik pemodal asing untuk peningkatan mutu perkebunan

Mengingat prospek komoditi teh di pasaran internasional yang bagus dengan permintaan kebutuhan teh di dunia lebih besar dibandingkan dengan permintaan dalam negeri yang hanya mencapai 20%, sehingga 80% dari produksi teh nasional dialihkan untuk pasaran internasional. Tidak hanya adanya bantuan Bank Dunia dan IDA yang memberikan kredit bantuan, namun diperlukan sebuah badan usaha yang padat modal seperti PTP untuk menarik para pemodal – pemodal yang akan berinvestasi di perkebunan Indonesia.

Investasi modal di perkebunan bertujuan untuk mengadakan, memperkuat potensi ataupun memulihkan kapasitas berbagai unsur/faktor produksi dan sarana pemasaran produk di perkebunan. Sehingga penting adanya pemodal untuk meningkatkan perkebunan nasional. Mengingat pemasukan pendapatan dari perusahaan perkebunan tanaman tahunan umumnya lambat, maka klasifikasi untuk investasi modal berjangka relatif panjang

untuk melakukan peremajaan, rehabilitasi kebun dan lain – lain. Oleh karena itu, perlu adanya sikap pemerintah yang menjamin prospek yang bagus untuk pasaran internasional. James J Spillane dalam buku *Komoditi Teh: Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia* menjelaskan peranan pemerintah terhadap perkebunan nasional, yaitu:

Pemerintah sebagai instansi tertinggi yang mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan pengembangan komoditi, bank – bank negara dan swasta yang diberi atau memiliki kekuasaan penuh dalam penetapan kebijaksanaan investasi modal, dan pengusaha – pengusaha perkebunan (swasta atau negara) yang harus melaksanakan di lapangan, masing – masing masih memiliki pandangan yang berbeda terhadap urgensinya investasi modal. Keadaann itu menyebabkan adanya peraturan – peraturan dan sikap – sikap yang dapat dirasakan sebagai situasi yang kurang menunjang proses investasi modal di sektor perkebunan.<sup>4</sup>

Dengan wewenang yang dimiliki pemerintah tersebut, membuat investasi modal untuk perkebunan nasional kecil. PTP yang berdiri sebagai perseroan terbatas dianggap lebih menggairahkan para pemodal, karena PNP dapat menjadi suatu badan yang bekerjasama dengan saham modal yang berfungsi di bawah hukum komersial (Commercial Code)<sup>5</sup> yang manfaatnya dinyatakan dalam bentuk uang dan nyata diterima oleh perusahaan.

---

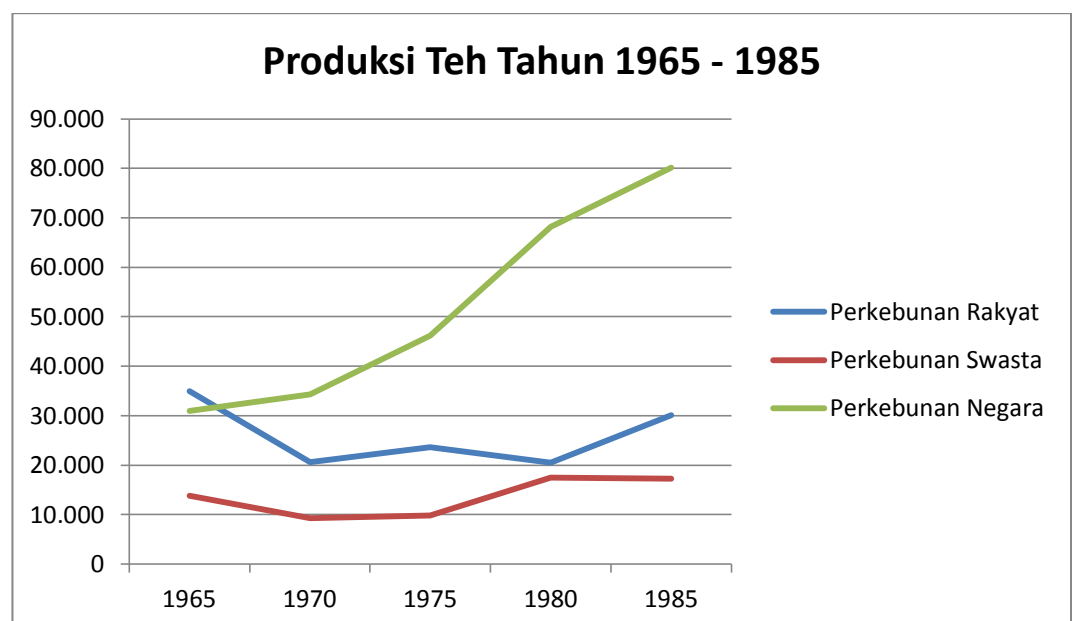
<sup>4</sup> James Spillane, *Komoditi Teh : Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hlm. 150.

<sup>5</sup> Commercial Code, secara hukum adalah kodifikasi hukum pribadi yang berkaitan dengan pedagang, perdagangan, entitas bisnis (terutama perusahaan), kontrak komersial dan hal lain yang dapat dinegosiasikan.

b. Kurangnya konsumsi teh dalam negeri

Sejak nasionalisasi dilakukan, pemerintah terus – menerus melakukan berbagai upaya pemulihan – pemulihan perkebunan milik asing, pembinaan, peremajaan, bahkan menaikkan harga untuk meningkatkan mutu dan hasil produksi tanaman teh.

**Grafik 3.1.1 Produksi Teh Indonesia Tahun 1965 - 1985**



Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa produksi teh dalam negeri terus mengalami peningkatan, terutama perkebunan negara. Namun, konsumsi teh di dalam negeri hanya sekitar 20% dari produksi teh nasional.<sup>6</sup> Secara umum, potensi pemasaran tanaman teh dapat diukur dengan menghitung antara penawaran dan permintaan. Mengingat teh bukanlah kebutuhan pokok, maka kebutuhan tanaman teh itu pun kurang menguntungkan di

<sup>6</sup> Teh Jabar Menerobos Pasaran Internasional dalam *Kompas* (Jakarta), 13 Juli 1988.

pasaran dalam negeri.<sup>7</sup> Kondisi tersebut mengakibatkan produksi yang ada mengalami kelebihan produksi.

Jadi, jumlah produksi yang dihasilkan dengan permintaan pun tidak seimbang. Namun, tingginya permintaan teh khususnya teh hijau justru terjadi di dunia. Konsumsi teh dalam negeri yang sedikit, produksi yang meningkat setiap tahun, dan permintaan pasar internasional semakin tinggi, membuat pemerintah melakukan peralihan orientasi pemasaran teh hijau. Yang sebelumnya lebih mengutamakan pemasaran dalam negeri kemudian beralih lebih kepada pasaran internasional. Tetapi, perusahaan – perusahaan perkebunan nasional belum cukup untuk menjangkau kembali pasaran internasional tersebut. Sehingga dibutuhkannya sebuah organisasi yang dapat menjangkau pasaran internasional agar dapat memasarkan kembali komoditi teh Indonesia..

c. Kedudukan tanaman teh sebagai komoditi ekspor

Pada tahun 1971, banyak dilakukan upaya perbaikan pada perkebunan teh negara seperti melakukan pemeliharaan, rehabilitasi kebun dan melakukan pelatihan – pelatihan tenaga kerja. Mengingat orientasi pengembangan tanaman teh lebih banyak ditujukan untuk kepentingan ekspor, maka perubahan maupun perbaikan akan lebih mudah dilakukan dengan pemusatan organisasi.<sup>8</sup> Dengan melakukan peralihan dari bentuk perusahaan negara (PN) ke perseroan terbatas (PT) ini mampu membawa peningkatan ekspor teh Indonesia (Lihat Tabel 3.3.3). Bentuk dari PT ini

---

<sup>7</sup> Ita Setiawati, *op.cit.*, hlm. 147.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

memudahkan tanaman teh Indonesia untuk lebih maju di pasaran internasional.

Sejak awal penanaman teh memang dikhususkan untuk perkebunan besar, baik yang diusahakan oleh negara maupun swasta. Oleh karena itu, perusahaan – perusahaan perkebunan seperti PTP dimaksudkan untuk pengusahaan tanaman teh tersebut terkoordinasi melalui manajemen yang memadai mengingat orientasi tanaman teh untuk kepentingan ekspor. Sehingga, perkebunan besar relatif mendapatkan dukungan modal dan manajemen yang memadai, dibandingkan perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Oleh karena itu, PTP yang merupakan suatu bentuk perusahaan persero ini lebih memudahkan pemasukan modal – modal asing. Dengan kedudukan PTP yang mewakili perkebunan – perkebunan Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana dari International Development Association (IDA) dan Bank Dunia. Dana bantuan tersebut yang dipergunakan untuk rehabilitasi kebun, pembibitan penanaman, dan peremajaan tanaman, pembangunan pabrik pengolahan maupun untuk biaya modal kerja.<sup>9</sup>

## **B. Pengelolaan Perkebunan Teh Gunung Mas Tahun 1968 – 1996**

Perkebunan Gunung Mas terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejarah awal perkebunan ini terdapat dua perkebunan yaitu “*Goenoeng Mas Francoise Nederlandise de Culture et de Commerce*” yang didirikan oleh maskapai Perancis pada tahun 1910 dan perkebunan “*NV.*

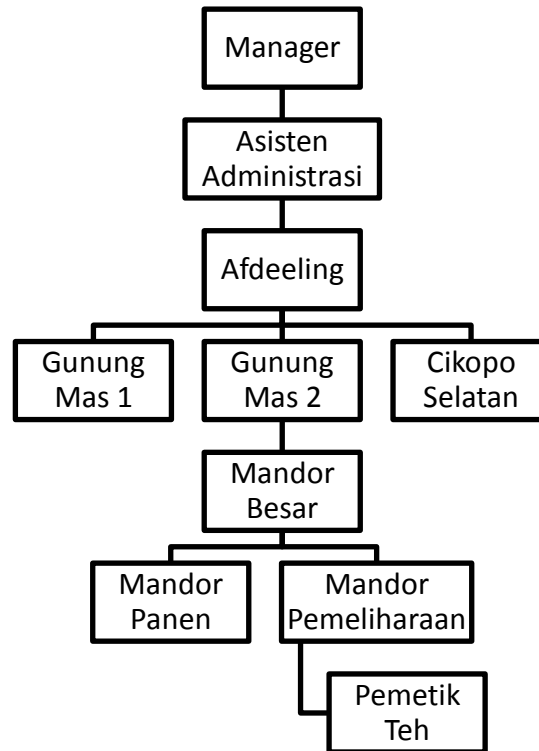
---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 26.



*CULTURE MY TJIKOPO ZSUID*” yang didirikan oleh perusahaan Jerman pada tahun 1912. Perkebunan ini memiliki pabrik tersendiri yang didirikan pada tahun 1912. Pada tahun 1949 Perkebunan “*NV. CULTURE MY TJIKOPO ZSUID*” diambil alih oleh Pemerintahan Belanda karena Pemerintah Jerman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia ke II. Pada tahun 1954 pengelolaan Perkebunan “*Goenoeng Mas Francoise Nederlandise de Culture et de Commerce*” diserahkan kepada Perusahaan Belanda menjadi “*NV TIEDEMAN E. VAN KERCHEM (TVK)*” yang memiliki kantor pusat di Bandung. Adanya nasionalisasi yang sudah dirancang pemerintah tahun 1957, maka pada tahun 1958 ke dua perkebunan milik Belanda tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimasukkan dalam PPN Baru kesatuan Jabar II yang kemudian terus mengalami pergantian – pergantian perusahaan. Adanya pengelolaan perusahaan perkebunan ini, struktur pengelola perkebunan pun berubah dari masa kolonial. Berikut struktur kepegawaiannya di Perkebunan Gunung Mas adalah:

**Gambar 3.2.1 Struktur Kepegawaian Perkebunan Gunung Mas**



Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Berdasarkan gambar diatas, perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh kepala afdeeling ketika masa kolonial pun berubah yang kemudian dipimpin oleh manager yang membawahi asisten administrasi yang ditunjuk langsung oleh perusahaan perkebunan. Manager, asisten administrasi dan kepala afdeeling ini bekerja untuk mengurus pendataan produksi, serta pengelolaan pabrik dan kebun yang dianjurkan oleh PTP. Oleh sebab itu, pendidikan untuk manager, asisten administrasi dan kepala afdeeling minimal merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di Perkebunan Gunung Mas yang tergabung dalam PTP XII, manager, pegawai administrasi dan kepala afdeeling Perkebunan Gunung Mas dinaungi oleh kantor pusat PTP yang berwenang mengangkat pegawai, melakukan

mutasi dan lain sebagainya. Masa kerja untuk pegawai biasanya hanya sampai 10 tahun, terkecuali adanya mutasi karena kebutuhan pegawai di perkebunan lain. Jadi, pegawai yang ada di Perkebunan Gunung Mas dapat dipindahkan ke perkebunan lain yang masih dibawah naungan kantor pusat PTP.

Kemudian, setiap kepala afdeeling yang membawahi setiap mandor. Mandor dan pemetik teh di Gunung Mas jarang terjadinya mutasi ke perkebunan lain, hanya terjadi perpindahan jabatan saja sehingga yang bekerja sebagai mandor dan pemetik adalah masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Gunung Mas (Bogor atau Puncak). Berbeda dengan manager, asisten administrasi dan afdeeling yang biasanya bukan masyarakat sekitar Gunung Mas. Karena tenaga kerja untuk mandor dan pemetik lebih banyak menggunakan tenaga kerja lokal sekitar perkebunan sehingga pendidikan untuk mandor dan pemetik teh minimal lulusan Sekolah Dasar, meskipun untuk pemetik teh ada beberapa yang tidak menempuh pendidikan.

Tujuan PTP untuk melakukan mutasi tenaga kerja tersebut adalah agar para pegawai di perkebunan PTP lebih memiliki ilmu dan pengalaman bekerja di perkebunan yang pada awal nasionalisasi mengalami kesulitan – kesulitan. Banyaknya perkebunan yang dikelola PTP, tidak hanya perkebunan teh saja melainkan ada perkebunan kopi, kelapa sawit, kakao, tebu, dan lainnya, hanya dengan melakukan pembinaan dalam pekerjaan di perkebunan kurang memberikan hasil yang cukup untuk tenaga kerja pribumi meningkatkan perkebunan nasional. Mutasi tersebut merupakan bentuk untuk meningkatkan

mutu pegawai pribumi memahami pengelolaan perkebunan dengan berbagai permasalahan yang berbeda di setiap perkebunan.

Di Perkebunan Gunung Mas memiliki 3 kepala afdeeling yang mengelola setiap afdeeling (bagian dari suatu daerah yang luas) perkebunan. Dari segi wilayah, Perkebunan Gunung Mas ini memiliki 3 perkebunan afdeeling dengan bloknya masing – masing, yaitu: (Lihat Gambar 3.1)

- a. Afdeeling Gunung Mas I : wilayahnya berada di desa Tugu hingga Taman Safari.
- b. Afdeeling Gunung Mas II : wilayahnya berseberangan dengan Gunung Mas I, berbatasan dengan Perkebunan Ciliwung milik PT Astra, namun ada beberapa bagian yang mengambil wilayah Gunung Mas I yang berada dibelakang Tea Corner (dekat pintu masuk Gunung Mas).
- c. Afdeeling Cikopo Selatan: wilayahnya dari Taman Safari sampai Desa Citeko.

Gambar 3.2.2 Letak Perkebunan Gunung Mas



Sumber: Hasil wawancara di Perkebunan Gunung Mas

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa Perkebunan Gunung Mas berada di Kabupaten Bogor tepatnya di Kecamatan Cisarua. Wilayah Perkebunan Gunung Mas meliputi beberapa desa di Cisarua seperti Desa Tugu Utara, Desa Tugu Selatan, Desa Cibereum dan Desa Citeko. Di Desa Tugu Selatan merupakan pusat dari Perkebunan Gunung Mas yang terdapat Afdeeling Gunung Mas I, di Desa Tugu Utara terdapat Afdeeling Gunung Mas II, dan di Desa Citeko dan Cibereum terdapat Afdeeling Cikopo Selatan.

Pada masa sebelum PTP, afdeeling Cikopo Selatan bernama Perkebunan Cikopo, merupakan afdeeling yang belum bergabung dengan afdeeling Gunung Mas meskipun perusahaan perkebunannya (masa PNP) dalam satu pengelolaan. Perkebunan Cikopo terdiri dari 6 afdeeling yaitu afdeeling Arca, Lembah Nened, Babakan, Pakan Cilan, Cicapit, dan Panjang Sidokom. Dengan mempunyai 6 afdeeling, Perkebunan Cikopo memiliki luas areal yang lebih banyak dengan Gunung Mas I dan II yaitu mencapai 778 ha. Sehingga, Perkebunan Cikopo mempunyai pabrik tersendiri. Namun, ketika tahun 1970, pabrik tersebut mengalami kebakaran sehingga hasil produksi pun dilimpahkan ke pabrik yang berada di Gunung Mas I, dan pada tahun 1972 Perkebunan Gunung Mas dan Perkebunan Cikopo digabung menjadi Perkebunan Gunung Mas di bawah naungan PTP XII.

Tiga wilayah afdeeling Gunung Mas ini merupakan tanggung jawab dari 3 kepala afdeeling di masing – masing afdeeling. Setiap satu kepala afdeeling membawahi empat mandor besar yaitu dua mandor panen dan dua mandor

pemeliharaan. Mandor besar panen bertanggung jawab dalam panen produksi teh setiap harinya, sehingga produksi yang dihasilkan harus memenuhi target yang diharapkan. Sedangkan mandor besar pemeliharaan bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan tanaman teh baik dalam pemupukan, penanaman, pemberantasan hama dan lainnya dalam pemeliharaan untuk menjaga tanaman teh tersebut dapat menghasilkan kualitas teh yang bermutu. Setiap mandor membawahi 40 pemetik teh yang kebanyakan adalah perempuan, walaupun ada beberapa laki – laki yang bekerja sebagai pemetik teh.

Untuk mandor pemeliharaan lebih banyak membawahi pekerja laki – laki untuk melakukan penyemprotan hama, memangkas rumput liar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman teh itu sendiri. Mandor panen yang bertanggung jawab dalam menghitung jumlah hasil panen teh, sebelumnya harus melakukan pengecekan terhadap pohon teh itu sendiri, apakah sudah bisa dipanen atau tidak karena masa puncak teh yang tumbuh membutuhkan waktu 25 – 30 hari. Jadi, apabila dalam satu hari sudah memetik pucuk dalam satu blok maka keesokan harinya akan berpindah ke blok lainnya. Oleh karena itu, pengecekan itu dilakukan di setiap blok afdeeling yang menjadi tanggung jawab mandor panen.

Pemetik teh setiap harinya bekerja selama 7 jam dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang, hal ini juga berlaku untuk mandor dan kepala afdeeling yang juga bekerja di lapangan. Hasil panen itu pun akan dicatat yang kemudian pencatatan tersebut dilaporkan kepada asisten administrasi sebagai laporan bulanan. Hasil

panen sebagian dibawa ke pabrik untuk diolah dan sebagian tidak diolah. Keduanya akan dikirim ke kantor pusat PTP untuk diekspor ke berbagai negara dan dijual di pasaran dalam negeri. Hasil pengelolaan pabrik menghasilkan produk – produk asli dari PTP yaitu Golpara dan Walini yang diekspor dan dipasarkan dalam negeri.

Kebutuhan teh yang besar baik untuk pasaran internasional maupun pasaran dalam negeri. Banyaknya permintaan komoditi teh, membuat setiap perkebunan nasional harus terus meningkatkan hasil produksinya untuk memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, Perkebunan Gunung Mas harus bisa mencapai target hasil yang diinginkan setiap harinya. Biasanya target yang harus dicapai satu orang pemetik teh adalah 40 – 50 kg. Jika hasil yang didapat lebih banyak maka akan diberikan premi atau tambahan upah kerja, tetapi bila tidak mencapai target akan mendapatkan hukuman berupa pengurangan upah kerja. Para pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas merupakan para masyarakat yang tinggal berdekatan dengan perkebunan. Perkebunan merupakan lapangan pekerjaan yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di perkebunan. Banyak dari pemetik teh ini bekerja sejak usia belasan tahun, jadi tidak heran jika banyak pekerja anak – anak di perkebunan.

Banyak faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak – anak di perkebunan, ada yang memang bekerja untuk mencari nafkah adapula yang bekerja karena mengikuti orang tua yang bekerja sebagai pemetik teh kemudian



merasa ingin melakukan pekerjaan itu juga.<sup>1011</sup> Apalagi pada saat itu pendidikan tidak menjadi tolak ukur untuk bekerja di perkebunan. Jadi pekerja lapangan sebagai pemetik teh, mandor, dan kepala afdeeling hanya lulusan dari Sekolah Dasar.<sup>12</sup> Seluruh tenaga kerja di perkebunan PTP hanya memiliki batas bekerja hingga 55 tahun. Jika seorang pemetik teh sudah memasuki masa pensiunnya maka biasanya akan digantikan oleh anak atau cucunya, sehingga para pemetik teh ini dilakukan turun – temurun. Tidak hanya pemetik teh, tetapi mandor dan kepala afdeeling juga dilakukan secara turun – temurun.

Terdapat dua kategori golongan pekerja di Gunung Mas, yaitu pekerja tetap dengan pekerja sewa (honor), pekerja yang pekerjaannya tidak tetap hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan saja. Biasanya pekerja sewa ini dikarenakan hasil produksi yang melimpah namun SDM – nya tidak mencukupi. Pekerja tetap adalah pekerja yang sudah terikat kontrak dengan PTP untuk bekerja di Gunung Mas berdasarkan waktu yang ditentukan.

**Tabel 3.2.1 Jumlah Tenaga Kerja Di Perkebunan Gunung Mas/Cikopo Selatan Bulan April 1986.**

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai staf/bulanan/honorar	
	- Staf	10

<sup>10</sup> Bila Daun Teh Mulai Bergoyang dalam *Kompas*, 13 Juli 1988.

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak Aceng Ahya, Kepala Afdeeling Perkebunan Gunung Mas II, 20 Mei 2017.

<sup>12</sup> Wawancara, Bapak Ruliyana, Bagian Keamanan Perkebunan Gunung Mas, 17 Mei 2017.

	- Bulanan	75
	- Honorer	1
2	Karyawan harian:	
	- Harian tetap	904
	- Borongan	646
Jumlah		1.636

Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Pekerja sewa ini merupakan masyarakat yang diperoleh dari beberapa desa disekitar perkebunan, yang kemudian dijadikan pekerja sewaan, biasanya banyak dibutuhkan di bagian yang memang membutuhkan banyak tenaga kerja seperti pemetik teh dan pekerja pabrik. Dari segi pekerjaan antara pekerja tetap dan pekerja sewa tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah fasilitas yang didapatkan, yaitu:

**Tabel 3.2.2 Perbedaan Pekerja Tetap Dengan Pekerja Sewa Di Perkebunan Gunung Mas**

<b>Pekerja Tetap</b>	<b>Pekerja Sewa</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terikat kontrak</li> <li>2. Gaji didapatkan setiap hari dan tetap (bekerja atau tidak bekerja tetap diberikan upah)</li> <li>3. Mendapatkan rumah dinas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terikat kontrak</li> <li>2. Gaji didapatkan setiap hari dan tidak tetap (jika bekerja akan di berikan upah jika tidak bekerja tidak akan diberikan upah)</li> </ol>

<p>4. Mendapatkan jaminan kesehatan</p> <p>5. Mendapatkan cuti tahunan (diberikan 15 hari setiap tahunnya, apabila sudah bekerja selama 3 tahun akan dilipatgandakan menjadi 30 hari)</p>	<p>3. Tidak mendapatkan rumah dinas</p> <p>4. Tidak mendapatkan jaminan kesehatan</p> <p>5. Tidak mendapatkan cuti tahunan</p>
---	--

Tampak bahwa PTP banyak fasilitas yang diberikan kepada pekerjanya. Terutama yang sangat memuaskan adalah diberikannya rumah dinas untuk manager hingga pemetik teh. Hal ini dilakukan agar memudahkan atau melancarkan pekerjaan mereka, khususnya untuk manager, asisten administrasi dan kepala afdeeling yang bukan merupakan masyarakat sekitar perkebunan. Rumah dinas tersebut menjadi sebuah perumahan bagi pemetik teh di setiap afdeeling (Lihat lampiran 6), antara lain:

1. Afdeeling Gunung Mas I terdapat 2 perumahan yaitu Perumahan Gunung Mas dan Perumahan Rawa Dulang.
2. Afdeeling Gunung Mas II terdapat 2 perumahan yaitu Naringgul Atas dan Naringgul Bawah.
3. Afdeeling Cikopo Selatan terdapat 1 perumahan yaitu Perumahan Panjang.

Namun, ada beberapa pemetik teh yang sebagai pekerja tetap tidak mau menempati rumah dinas yang diberikan. Para pemetik teh tersebut berpendapat bahwa lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri daripada di rumah dinas akan merepotkan untuk melakukan pindahannya, dan setiap hari ada mobil jemputan yang mengantar ke tempat bekerja.<sup>13</sup> Ketidakinginan untuk menempati rumah dinas banyak dilakukan oleh pemetik teh yang berada di afdeeling Cikopo Selatan dan afdeeling Gunung Mas II. Kebanyakan rumah mereka berada di desa – desa sekitar Gunung Mas seperti Desa Kuta, Pakancilan, Lembah Nendet, Suka Gali, dan lainnya.

Meskipun perbedaan menjadi pekerja tetap lebih menguntungkan dibandingkan pekerja sewaan, tetapi kebutuhan pengasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sangat dibutuhkan apalagi untuk masyarakat yang tinggal di pegunungan yang hanya bisa mengandalkan pekerjaan dari pertanian atau perkebunan. Pekerja sewaan ini juga sangat membantu perkebunan terutama disaat pucuk teh sedang melimpah sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk memetikanya. Memang, pekerjaan di perkebunan membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk pemetikan agar memenuhi target yang diinginkan, pemeliharaan dengan luasnya areal perkebunan harus bebas dari hama agar mutu teh terjaga dengan baik, pengolahan pabrik untuk menghasilkan produk yang akan di pasarkan dan pengelolaan administrasi untuk mengatur hasil produksi agar bisa diekspor ke berbagai negara.

---

<sup>13</sup> Wawancara, Ibu Yati, Pemetik Teh di Cikopo Selatan, 17 Mei 2017.

### C. Usaha Teh Nasional Menjadi Eksportir di Pasaran Internasional

Komoditi teh sebenarnya dapat menjadi komoditi yang menguntungkan untuk ekonomi negara terutama sebagai ekspor nasional. Keterpurukan produksi teh selama tahun 1942 – 1969, mengakibatkan ekspor teh Indonesia menurun. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya PTP untuk lebih meningkatkan ekspor teh Indonesia di pasaran internasional. Pengelolaan teh Indonesia memiliki sistem pemasaran yang sangat berbeda dengan teh dari negara – negara produsen teh lainnya seperti Cina, India dan Srilanka sebagai produsen teh terbesar di dunia. Di samping untuk diekspor sebanyak hampir 20%, sebagian yang tidak diekspor dipasarkan untuk konsumsi dalam negeri. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas teh Indonesia dianggap lebih rendah daripada negara lain di pasar dunia. Inilah yang menjadi tantangan yang besar bagi perkebunan teh milik perkebunan besar negara (PTP) untuk kembali menjadi pengeksportir teh terbesar di pasar dunia.<sup>14</sup>

Mekipun kualitas teh Indonesia masih rendah tetapi masih banyak permintaan teh Indonesia di negara Amerika Serikat, Pakistan, Rusia, dan negara – negara Timur Tengah. Adapula faktor yang membuat komoditi teh kembali diekspor oleh pemerintah adalah adanya “boom” (lonjakan dalam harga minyak bumi di pasar internasional pada tahun 190 – an. Lonjakan pertama terjadi karena embargo dalam ekspor minyak bumi yang dilakukan negara – negara anggota OPEC, khususnya negara – negara Arab pada tahun 1973/1974 terhadap negara – negara Barat yang mendukung Israel. Lonjakan kedua pada akhir tahun 1978

---

<sup>14</sup> James Spillane, *op.cit.*, hlm. 66 – 67.

akibat terjadinya revolusi Iran yang menggulingkan Shah Iran sebagai negara pengekspor minyak bumi kedua terbesar setelah Arab Saudi, gejolak politik di Iran untuk sementara menghentikan pasokan minyak bumi dari Iran. Sehingga terjadi lonjakan harga minyak bumi yang mempengaruhi harga minyak bumi Indonesia secara nominal meningkat dari US\$ 1,67 per barrel pada tahun 1970 sampai US\$ 35 per barrel pada tahun 1981. Berkat kedua “boom” minyak bumi, penerimaan ekspor Indonesia maupun penerimaan pemerintah dari pajak atas penghasilan perusahaan minyak asing mengalami lonjakan yang tajam.<sup>15</sup> Komoditi migas yang mengalami penurunan selama tahun 1970 – an, membuat komoditi nonmigas (seperti perkebunan) diupayakan untuk lebih menonjol. Perekonomian dunia yang persaingan dagang semakin ketat di dunia, sehingga Indonesia perlu mengatur kembali strategi perdagangan luar negerinya.<sup>16</sup> Dengan beralihnya fokus ekonomi pemerintah dari migas ke nonmigas, telah memulai kerjasama internasional untuk melakukan pemasaran komoditi teh Indonesia.

Pemerintah Orde Baru juga memutuskan untuk meninggalkan kebijakan “memandang ke dalam” (inward – looking policies) dan menggantinya dengan kebijakan “memandang keluar” (outward – looking policies). Kebijakan ini dicirikan oleh kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan investasi asing yang bersifat lebih liberal. Itu artinya, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan yang dapat menghapus atau mengurangi berbagai rintangan atas

---

<sup>15</sup> Taufik Abdulah, A. B Lopian, Stararlita, dkk, *Indonesia Dalam Arus Sejarah*, Jilid 8 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 157.

<sup>16</sup> Makin Berat, Tantangan Ekspor Nonmigas Indonesia dalam *Kompas*, 10 Januari 1979.

perdagangan luar negeri dan investasi asing.<sup>17</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh

Menteri Perdagangan, Arifin M. Siregar, bahwa :

...mula berorientasi ke pasar dalam negeri sebagai kebijakan substitusi impor yang menjadi orientasi ekspor. Bahkan ekspor ini sudah berubah fungsinya menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekspor nonmigas manfaatnya bukan hanya menjadi sumber pemasok devisa melainkan mempunyai dampak ganda bagi perekonomian domestik lewat penciptaan kesempatan kerja, dan kegiatan produksi yang membutuhkan aneka macam material pendukung.<sup>18</sup>

Oleh karena perubahan orientasi perekonomian negara yang berorientasi ekspor maka, beberapa alternatif yang diusahakan untuk meningkatkan pemasaran teh Indonesia di pasaran internasional, antara lain:

1. Bekerjasama dalam pengolahan dan pemasaran teh di Mesir antara Indonesia – Mesir – Kuwait untuk pasaran teh di beberapa negara Timur Tengah, serta Afrika Utara.
2. Counter Tradea antara Indonesia dan Pakistan di samping anatra Indonesia dan Rusia.
3. Kerjasama pemasaran branded – tea (teh ber – merk) seperti dilakukan antara PTP XIII dan Tokyo Shoji untuk pasaran Jepang.
4. Kerjasama pemasaran teh seperti di atas dengan Saudi Arabia dan Emirat Arab.
5. Kerjasama pendiri pengolahan teh untuk pasaran internasional antara PTP XII, XIII dan Unilever Indonesia.

---

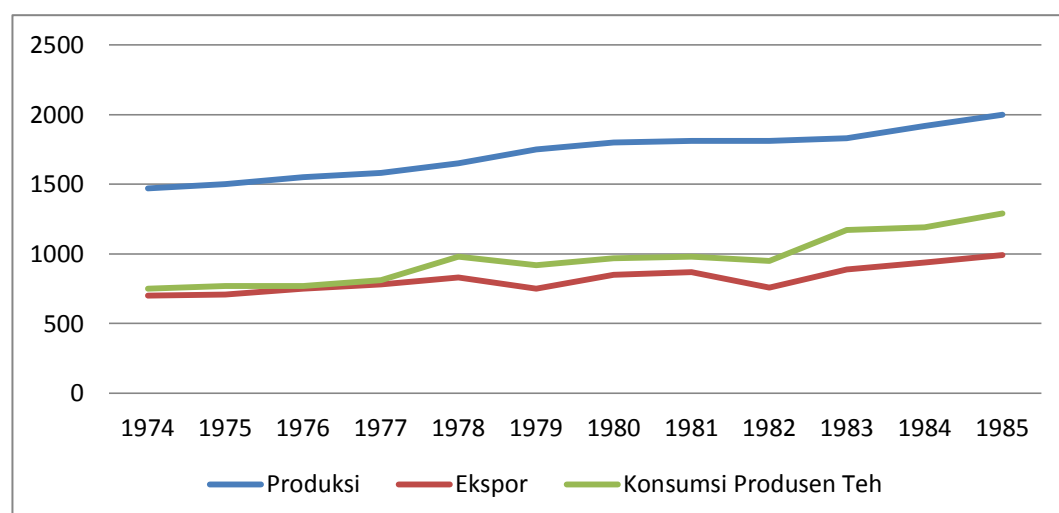
<sup>17</sup> Taufik Abdulah, *op.cit.*, hlm. 153.

<sup>18</sup> Terganggunya Ekspor Akan Membahayakan Pembangunan dalam *Kompas*, 11 Januari 1989.

6. Peningkatan kampanye (promosi) branded – tea (merk Aroma, Gunung Mas dan Sedap) bekerjasama dengan Garuda, Merpati, PHRI, di samping Trade Promotion yang diadakan baik di dalam negeri (PRJ, PPE, Tea Corner di hotel – hotel berbintang) maupun pameran yang diadakan di luar negeri dan berbagai media massa.
7. Pemanfaatan agen komisi di luar negeri untuk peningkatan pemasaran teh (Syria, Yordania, Pakistan, dan Eropa Timur)<sup>19</sup>

Pada masa REPELITA II (1973 – 1978), harga teh di pasaran internasional menunjukkan fluktuasi harga yang sangat tajam. Bahkan, pada tahun 1977 terjadi panic buying yang membuat konsumsi teh dunia mengalami kenaikan di pasaran internasional hingga tahun – tahun berikutnya dalam grafik dibawah ini.

**Grafik 3.3.2 Produksi, Konsumsi Dan Ekspor Teh Sedunia Tahun 1974 – 1985**



Sumber : James Spillane, 1992, hlm. 28.

<sup>19</sup> Ita Setiawati, *op.cit.*, hlm. 157.



**Tabel 3.3.3 Volume Dan Nilai Ekspor Teh Hitam Indonesia Tahun 1978 - 1982**

Tahun	Ekspor (Ton)	Nilai (000.US\$)
1978	50.325	85.273
1979	50.797	79.334
1980	58.682	87.708
1981	64.217	90.802
1982	56.656	80.683

Sumber : James Spillane, 1992, hlm. 78.

Berdasarkan grafik 3.3.2 menunjukkan meningkatnya peranan komoditi teh di pasaran internasional yang menyebabkan volume ekspor perkebunan nasional terus mengalami peningkatan yang tajam pada tabel 3.3.3. Meskipun terjadi penurunan volume ekspor pada tahun 1982, nilai ekspor tidak mengalami penurunan yang tajam hanya 80.683 dari 90.802 tahun 1981. Ini menunjukkan permintaan komoditi teh di pasaran internasional semakin meningkat dengan nilai harga teh semakin tinggi. Seperti yang ada di grafik di bawah ini, menunjukkan bahwa ekspor teh Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan konsumsi di dunia yang terus meningkat dibandingkan pemasaran teh dalam negeri yang lebih sedikit konsumsinya.

**Tabel 3.3.4 Produksi Dan Konsumsi Komoditi Teh Di Indonesia Tahun 1978 – 1985.**

Tahun Produksi		Konsumsi Dalam Negeri			Selisih
		Teh Hijau	Teh Hitam	Total	
1978	96.300	17.424	15.525	32.949	63.531
1979	97217	19.069	13.488	32.537	64.680
1980	106.175	20.489	7.336	27.825	78.350
1981	108.556	23.269	15.615	38.834	69.722
1982	92.723	18.079	10.865	28.944	63.788
1983	110.317	25.360	25.095	50.455	59.862
1984	126.343	25.426	17.725	43.151	83.192
1985	127.464	23.500	19.091	42.491	84.873
LP	4	4,27	2,9	3,6	3,6

Sumber: Ita Setiawati, 1991, hlm. 110.

Berdasarkan grafik 3.3.3 dengan tabel 3.3.4, jumlah konsumsi dari dalam negeri lebih kecil melihat dari selisih antara produksi dengan total produksi. Produksi yang dihasilkan perkebunan teh nasional bisa mencapai 100.000 – an/ton setiap tahunnya, sedangkan total konsumsi tidak pernah lebih dari 50.000 ton. Mencapai tahun 1984 dan 1985, produksi yang semakin meningkat, daripada konsumsi yang semakin menurun dari tahun 1983 yang mencapai 50.000 ton. Hasil tersebut sangat jauh dari konsumsi teh di dunia yang setiap tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya produksi dan ekspor teh Indonesia.

Kondisi ini membuat kembalinya Indonesia sebagai pengekspor teh terbesar di pasaran internasional yang pada tahun 1974 – 1987 laju pertumbuhan produksi teh di India tercatat sebesar 2,32%, Srilanka sebesar 0,38%, Cina sebesar 6,8%, Indonesia 6,8%, negara – negara di Afrika 4,09%, negara – negara di Amerika Selatan 0,8%, Rusia 4,3% dan negara – negara produsen lain sebesar 7,0%.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara kedua pengekspor teh terbesar di dunia pada masa pemerintahan Orde Baru.

Jadi, kenaikan ekspor komoditi teh Indonesia, tidak terlepas dari usaha dari penanaman modal yang membantu dalam proses perbaikan – perbaikan dalam peremajaan, pemeliharaan dan pelatihan di perkebunan teh nasional yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang membuka hubungan internasional sehingga banyak modal – modal asing yang masuk ke perkebunan nasional dan kebijakan pergantian fokus ekonomi ke komoditi nonmigas. Hal tersebut semakin menguntungkan dengan melihat tingginya permintaan dari komoditi teh di dunia menjadi suatu kondisi yang menguntungkan, apalagi konsumsi komoditi teh dalam negerinya yang kurang diminati, maka pengeksporan komoditi teh pun menunjukkan peranan dalam perolehan devisa nonmigas sebanyak 2,4% pada tahun 1983.<sup>21</sup>

. Di Jawa Barat terdapat 2 perkebunan besar yaitu PTP XII dan PTP XIII dengan luas areal kebun teh sekitar 33.276 ha dan dengan hasil teh sekitar 61.615 ton/tahun. Perkebunan Gunung Mas yang merupakan salah satu perkebunan milik

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

PTP ini telah menjadi perkebunan besar yang prospek produksinya cukup memuaskan. Sama seperti perkebunan lainnya di bawah naungan PTP, Perkebunan Gunung Mas telah mengekspor banyak hasil tanaman basah (yang belum diolah) dan tanaman kering (yang sudah diolah di pabrik). Terlihat dari hasil produksi pada tahun 1982 hingga 1996 peningkatan dari hasil produksinya cukup signifikan.

**Tabel 3.3.5 Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Gunung Mas Tahun 1982 - 1996**

Tahun	Luas Areal	Produksi Teh Jadi (Kg)
1982	928.00	1.131.970
1983	949.74	1.125.953
1984	964.74	1.331.643
1985	969.64	1.438.351
1986	875.00	1.288.059
1987	860.66	1.131.882
1988	745.56	1.140.489
1989	656.93	1.170.622
1990	596.60	1.281.760
1991	552.32	1.056.178
1992	592.32	1.191.728
1993	742.63	1.218.575
1994	815.75	833.753

1995	891.70	1.121.795
1996	714.81	1.195.908

Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Berdasarkan tabel diatas, produksi dari Perkebunan Gunung Mas selalu mengalami kestabilan, meskipun terjadi penurunan luas areal yang cukup banyak dari tahun 1986 sampai 1992. Penurunan areal Perkebunan Gunung Mas disebabkan banyak areal yang diluncurkan karena tanamannya yang terlalu jarang atau dibongkar karena konvensi hutan dan kondisi tanah yang kurang bagus untuk ditanami teh. Dengan demikian, pertumbuhan produksinya lebih tinggi daripada laju pertumbuhan luas arealnya. Oleh karena itu, pertumbuhan produksi tidak selalu disebabkan oleh penambahan luas areal.<sup>22</sup> Besarnya produksi yang dihasilkan Perkebunan Gunung Mas tersebut tidak terlepas dari beberapa upaya manajemen pengelolaan yang baik dan tepat. Manajemen pengelolaan tersebut termasuk dalam perawatan teh yang tepat, pengelolaan yang maksimal dan penggunaan sumber daya manusia yang memadai dari perkebunan itu sendiri. Sedangkan dalam persaingan di pasar internasional, PTP yang memainkan peranan.

Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk usaha pemasaran teh Indonesia di pasaran internasional tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan produksi teh dalam negeri seperti pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan penghasilan bagi masyarakat. Karena bidang usaha produksi komoditi

---

<sup>22</sup> Ita Setiawati, op.cit., hlm. 93.

teh sangat membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar mulai dari pembukaan lahan untuk perkebunan, pembibitan, penanaman, pemupukan (pemeliharaan), pemetikan, pengangkutan, proses produksi, sampai pusat – pusat penjualan. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana sistem ekonomi yang dijalankan pemerintah Indonesia. Seperti “Trilogi Pembangunan” pada masa pemerintahan Soeharto dengan REPELITA yakni (1) Stabilitas Nasional, (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) Pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya.<sup>23</sup> Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk komoditi lebih kepada proses pemerataan yang tercermin dengan pemerataan pembagian pendapatan dan pemerolehan kesempatan kerja.<sup>24</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Perkebunan Gunung Mas memiliki banyak pekerja di setiap afdeelingnya, baik yang sebagai pekerja tetap maupun pekerja sewa. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mencapai produksi yang maksimal dengan jumlah tenaga kerja yang memadai untuk menggarap kebun – kebun teh dan bekerja di pabrik pengolahan. Pemanfaatan tenaga kerja yang cukup memadai ini telah berhasil menciptakan produksi yang stabil di Perkebunan Gunung Mas meskipun areal produksinya menurun. Kenaikan produksi antara lain berkat bantuan kredit dari luar negeri seperti modal asing dari berbagai negara, Bank Dunia dan IDA, yang tidak lepas dari usaha pendewasaan manajemen dari PNP menjadi PTP.

---

<sup>23</sup> S. W Barus dan H. Djaelani Sarmili, *30 Tahun Orde Baru Membangun* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Pers da Grafika Departemen Penerangan RI, 1995), hlm. 88.

<sup>24</sup> James Spillane, *op.cit.*, hlm 76.

Jadi, orientasi perkebunan pada masa Orde Baru berbeda dengan orientasi perkebunan sebelumnya. Pada masa Orde Baru orientasi perkebunan lebih banyak penyerahan penguasaan dan pemanfaatan perkebunan ke tangan pemilik modal besar melalui berbagai macam izin usaha. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan perkebunan nasional dengan adanya modal yang masuk ke Indonesia yang digunakan untuk biaya pembukaan lahan, perawatan kebun, dan lain sebagainya. Pemerintah pun memberikan suatu jaminan kepada pemilik modal berupa hak – hak seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU),<sup>25</sup> sehingga para pemilik modal merasa aman untuk terus bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan perkebunan nasional. Bahkan melalui HGU ini, luas areal perkebunan nasional (perkebunan negara, swasta, dan rakyat) mencapai 3,80 juta hektar yang dikuasai 1.206 perusahaan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soediono M. P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 403

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 405